

**BABAD PRAYUT:
ANALISIS PSIKOLOGI DAN JARINGAN POLITIK ABAD KE – 18¹⁾**

Oleh: Hermanu Joebagio²⁾

ABSTRACT

The purpose of this research to tries to analyze the Babad Prayut, especially to analyze psychology and political network of the elites of Jawa against the political and economic changed in the 18th Century.

The data were collected by primary and secondary sources of history. The primary sources was Babad Prayut, Serat Wulangreh, and Suluk Mas Nganten. The secondary sources was results of research of the 18th Century. The technique used to analyze the data was historical analysis.

The result of analysis shows that: (1) in the reign of Sultan Agung, the kratons of Java were at times themselves leading agents of Islamisation, reconciliation between Javanese culture and Islamic piety, and put the large kinship by weddings; (2) that political thinking produced to legitimation, and political legitimation are determine of interpersonal trust, civic engagement, and political engagement. The third factors are symbolization of political system; (3) political change occurred in the death of Sultan Agung were many of aristocrats to prefer to collaboration with the Dutch colonial; (4) that situation make the muslim leaders took opposition. They put his self as cultural broker, merchant princes, and counter elite.

Keywords : *Babad Prayut, elites of java, 18th century, political system, kraton.*

PENDAHULUAN

Babad Prayud merupakan karya sastra R.Ng. Yasadipura I, yang mengungkap tentang kelahiran, keturunan, dan perkawinan. *Babad Prayud* akan bermakna sangat dalam bila direkonstruksi melalui pendekatan historis, sehingga dapat ditemukan jejaring politik yang dibangun raja-raja Mataram maupun raja-raja *Vorstenlanden* (kerajaan-kerajaan Surakarta dan Yogyakarta). Jejaring politik digunakan untuk memperkuat kebesaran dan legitimasi politik, dan jejaring politik adalah alat kontrol terhadap kekuatan-kekuatan politik yang berada di daerah pinggiran yang memiliki tali persaudaraan dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian orang-orang pusat (biasanya anak-anak raja) yang menikah dengan keluarga ulama maupun pejabat daerah adalah 'mata-mata'. Mereka mengamati perilaku politik ulama dan penguasa daerah, khususnya dalam aspek kelayalan, serta kekuatan politik yang dimilikinya.

Politik perkawinan adalah jejaring politik, yang oleh Sultan Agung (1613-1645) diperkuat dengan kebijakan politik yang menempatkan keraton sebagai agen islamisasi, dan agama Islam sebagai wahana rekonsiliasi budaya Jawa

(Ricklefs, 1998a: 469-482). Kebijakan di atas merupakan penguatan kultur Islam-Jawa yang secara simbolis adalah bentuk subordinasi. Politik perkawinan kemudian menjadi bingkai subordinasi yang tidak disadari oleh ulama dan pejabat daerah. Kebijakan menempatkan Islam sebagai alat politik merupakan manifestasi *religio-political power*, bahkan Steenbrink (1984: 30) menyebut sebagai pengurangan politik (*policy of containment*) yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan.

Sejak awal islamisasi, ulama adalah peletak dasar *power culture*, membangun struktur ekonomi pantai, dan peletak perilaku sosial keagamaan (Taufik Abullah 1987: 120-155). Hubungan penguasa, ulama, maupun masyarakat merupakan bentuk sikap saling percaya (*interpersonal trust*) yang kemudian menjadi dasar keterlibatan mereka dalam hidup kewargaan (*civic engagement*). Dua faktor itu kemudian menjadi landasan terbangunnya keterlibatan politik (*political engagement*) antar mereka (Saiful Mujani, 2007: 26-27). Perubahan politik masa Amangkurat II (1677-1703), khususnya penerapan sistem politik sekuler, berakibat sebagian besar ulama melepaskan keterikatan dari politik istana (Soemarsaid

1) Ringkasan Penelitian DIPA Tahun Anggaran 2007

2) Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah J.PIPS FKIP UNS

Moertono, 1985: 37-39; Taufik Abdullah, 1987: 120-155). Mereka menekuni peran sebagai *cultural broker* dan *merchant princes* (van Leur, 1956; Kuntowijoyo dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique, ed., 1988: 116). Dengan posisi ini ulama adalah elit politik di lingkungan pedesaan dan berperan sebagai elit tandingan (*counter elite*) terhadap kekuasaan raja maupun kompeni (Taufik Abdullah, 1987: 120-136).

Keterpilahan kekuatan politik di atas merupakan gejala oposisi, dan umumnya mereka berjuang meraih kekuatan melalui mobilisasi massa (Haryatmoko, 2003: 7). Dengan mobilitas kekuatan massa itu memungkinkan kelompok-kelompok oposisi memasuki wilayah mekanisme politik untuk mewujudkan gagasan sebagai elit tandingan. Peran sebagai elit tandingan adalah motif pribadi, tetapi motif pribadi tersebut ditambahkan pada persoalan yang dihadapi masyarakat (Haryatmoko, 2003: 17). Motif pribadi dalam pemikiran Clifford Geertz (1975: 196-197) seringkali menimbulkan 'distorsi' yang bertalian dengan kebencian, nafsu, kecemasan ataupun ketakutan.

Dalam pendekatan behavioralisme Sigmund Freud (dalam Varma, 2007: 42) dimensi politis yang dapat diamati dari aktivitas mental manusia adalah represi, rasionalisasi, proyeksi, introjeksi, perasaan bersalah, frustrasi, kekecewaan, pembelaan, rasa tidak aman, dan sebagainya. Oleh karena itu, tujuan pendekatan psikologi politik adalah untuk memahami dan menggambarkan berbagai fenomena politik secara realistik. Fenomena politik secara realistik dapat digambarkan dengan mengamati perilaku politik seseorang maupun kelompok, baik melalui partai politik, pemerintahan, dan lembaga lain yang dipandang memberi sumbangan terhadap perubahan politik (Varma, 2007: 98).

Menurut Varma (2007: 99) ada dua paradigma yang dapat dijadikan acuan untuk memahami fenomena politik secara realistik, yaitu: (1) memusatkan pada unit-unit politik, (2) memusatkan pada proses politik. Unit-unit politik yang dijadikan pusat perhatian adalah individu, kelompok-kelompok sosial politik atau masyarakat, dan melalui figur itu dapat

dianalisis tentang karakter, perilaku, serta organisasi politikus. Sementara itu, dalam sisi proses politik, cenderung lebih mengutamakan analisis terhadap akibat-akibat dari berbagai peristiwa serta menjelaskan dampak yang bakal ditimbulkan oleh akibat-akibat itu.

Munculnya kelompok oposisi serta meluasnya intervensi kompeni ke dalam jantung kekuasaan raja tradisional Jawa berakibat goyahnya citra kebesaran dan legitimasi politiknya. Hancurnya citra dan legitimasi politik sangat disadari oleh penguasa, dan untuk membangun kembali kewibawaan yang telah hilang dikembangkan sastra budaya sinkretik (Simuh, 1988: 24-25). Sastra sinkretik, baik *babad*, *serat*, maupun *suluk*, adalah alat politik (Alex Sudewa, 1995: 2-5; 247-248). Dengan demikian sastra sinkretik adalah konstruk ideologis yang wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan sosial, dan merupakan bangunan mempertahankan *status quo*. Proses sosialisasi ideologis daripada sastra sinkretik adalah melalui budaya pelantunan, baik di lingkungan keraton maupun masyarakat (Florida, 2003: 20-70). Pelantunan terhadap sastra sinkretik dimaknai oleh para pelantun sebagai sebuah 'kebesaran' yang harus dijunjung tinggi.

Tujuan yang hendak dicapai melalui kajian sastra sinkretik '*Babad Prayut*' adalah menganalisis jejaring dan psikologi politik elit-elit Jawa dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi sepanjang abad XVIII. Analisis di atas sangat berguna bagi pengembangan sumber materi sejarah politik, serta dapat diekstrapolasikan ke dalam kehidupan politik masa kini.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam mengaji *Babad Prayut* adalah metode sejarah. Tujuan penggunaan metode sejarah adalah merekonstruksi psikologi dan jaringan politik abad XVIII, yang merupakan embrio hancurnya kesatuan Mataram. Ada empat langkah yang ditempuh dalam penggunaan metode sejarah, yaitu pencarian sumber, kritik sumber, perumusan fakta, dan penyajian pemikiran baru dalam bentuk penulisan sejarah (Hockett, 1967: 9; Renier, 1965:

106-110). Sumber data dalam kajian *Babad Prayut* meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa babad dan serat, sedangkan sumber sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

Ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menggunakan metode sejarah, yaitu bersifat diakronik (kesinambungan) dan sinkronik (perubahan-perubahan). Mengingat rumitnya inti persoalan *Babad Prayut* dalam hubungannya dengan psikologis elit politik dan jejaring politik yang dibangun, sehingga aspek diakronis harus dilengkapi dengan penjelasan analisis kritis tentang struktur psikologis dan jaringan politik itu (aspek sinkronisnya). Analisis kritis tercapai bila disertai dengan penggunaan pendekatan ilmu-ilmu sosial, baik politikologi, antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Penggunaan pendekatan itu disebut interdisipliner atau multidimensi (Sartono Kartodirdjo, 1992: 120-126; Burke, 1993: 1-21).

Prosedur kerja untuk memahami berbagai fenomena politik secara realistik adalah melakukan identifikasi dan memberi gambaran hubungan antar fakta yang ditemukan melalui pembacaan dan analisis peneliti terhadap *Babad Prayut*, khususnya perilaku elit politik Jawa yang diletakkan dalam konteks 'politik perkawinan' yang berdampak memperkuat jejaring politik antara pusat dan daerah, serta perilaku etik maupun moralnya. (Varma, 2007: 96). Tersusunnya fakta-fakta sejarah, kemudian, dilanjutkan membangun sintesis sejarah. Sintesis sejarah tidak dapat dilakukan apabila tanpa penjelasan (*eksplanation*) sejarah. Prinsip penjelasan sejarah adalah mencari saling keterkaitan, dan keterkaitan tersebut tidak hanya persoalan sebab-akibat, tetapi dimungkinkan adanya pertalian-pertalian lain yang masuk dalam peristiwa sejarah. Penjelasan sejarah dalam hubungan ini berupa definisi, justifikasi, menginterpretasikan, menjelaskan ketidaksesuaian, atau sejumlah kemungkinan lain tergantung dari yang diketahui dan perlu diketahui peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Babad Prayut Sebagai Jejaring Politik

Dalam perspektif politik, dunia *Babad Prayut* tahun 1760-an adalah pertalian perkawinan antar kelompok-kelompok politik dominan. Pertalian perkawinan itu bermakna untuk: (1) membangun kesadaran elit politik Jawa dan masyarakat tentang 'kebesaran sebuah institusi' yang disebut negara, (2) mengendalikan konfrontasi antar elit politik Mataram, khususnya antara PB II, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Dalam perspektif filsafat politik, konfrontasi antar elit politik Jawa sudah distrukturisasi oleh kompeni untuk memperoleh konsesi-konsesi ekonomi yang lebih luas. Penulisan *Babad Prayut* oleh R.Ng. Yasadipura I dimaksudkan untuk memacu kesadaran berbagai lapisan sosial terhadap 'kebesaran sebuah institusi negara' menjadi bersifat 'semu', dan secara filosofis tidak bermakna, karena institusi negara terlanjur rapuh oleh intervensi kompeni (Pemberton, 2003: 68-74).

Politik perkawinan merupakan strategi memperluas ikatan kekerabatan, tetapi karena besarnya jumlah kerabat, maka semakin rumit permasalahan yang muncul dan sulit dikendalikan. Hampir semua kerabat melakukan manuver politik dan beraliansi dengan kelompok-kelompok politik untuk mendapatkan keuntungan dan status dalam proses suksesi kekuasaan. Manuver dan aliansi politik mungkin saja berhasil meraih kekuasaan, tetapi dapat juga menghadapi kegagalan, dan tersingkir dari pentas dunia politik Jawa. Agaknya perkawinan politik dan seremonial menjadi dunia Jawa yang semakin dikenal dan dipahami oleh berbagai kelompok etnis, sehingga kelompok-kelompok sosial dalam ruang itu menemukan diskursus 'baru' sebagai ruang gerak mereka. Ruang diskursus yang dicapai dalam kurun waktu panjang, menggugah kesadaran, yakni sebagai orang Jawa.

Tafsiran di atas oleh R.Ng. Yasadipura I ditampilkan dalam sastra Jawa yang mengungkap ikatan politik perkawinan. Dengan menampilkan karya sastra tersebut diharapkan dapat mengikat kembali ikatan-ikatan persaudaraan yang terserak oleh persoalan suksesi. R.Ng. Yasadipura I berpandangan bahwa lemahnya ikatan persaudaraan membawa akibat lemahnya kedaulatan Jawa, dan kelompok-kelompok

oposisi akan secara terus-menerus menggoyang kekuasaan yang sah. Penggambaran ikatan perkawinan itu diharapkan membangun solidaritas 'baru' dan mempertahankan loyalitas kelompok-kelompok politik dalam masyarakat Jawa.

Perkawinan politik antara keluarga istana dan keluarga ulama, tampaknya tidak berhasil mengintegrasikan pemikiran kultural, tetapi justru membangkitkan tradisi dialog antara kekuatan ulama dengan penguasa dunia (Taufik Abdullah, 1982: 14). Dialog antar mereka mempertemukan dan mempertentangkan tentang nilai-nilai kemanusiaan universal, yang meliputi *hifdz-din* (kebebasan beragama), *hifdz-nafs* (memelihara kelangsungan hidup), *hifdz-nasl* (menjamin kelangsungan keturunan), *hifdz-mal* (menjamin kepemilikan harta benda), dan *hifdz-aql* (kreativitas berpikir, kebebasan ekspresi, dan mengeluarkan pendapat) (Aden Wijdan SZ, 2007: 205-207). Kemacetan dialog antar mereka memunculkan konflik terbuka. Sebagian besar ulama kultural kemudian membangun komunitas 'tersendiri' di pedesaan, memerankan diri sebagai *counter elite*, *cultural broker*, dan *merchant princes* (Taufik Abdullah, 1982: 120-155; van Leur, 1956).

Analisis John Pemberton (2003: 54-55) terhadap *Babad Prayut* menunjukkan bahwa hilangnya peran ulama sebagai *power culture* berakibat: (1) luntarnya etika dan moral satria Jawa, serta (2) meluasnya intensitas intervensi kompeni terhadap kehidupan istana. Sekelumit bait dalam *Babad Prayut* yang mengungkapkan surat Sultan Hamengkubuwana I yang hendak memperkenalkan dan menjodohkan putera mahkota dengan puteri Sunan PB III, sebagai berikut:

"Anak Prabu [PB III], adikmu ini [putera mahkota], adalah santri, seandainya Anak Prabu mengadakan pesta, adikmu belum pernah minum alkohol dan belum pernah menari [tarian tayub], dia cuma membaca al-Qur'an dan mengaji sejak masih kanak-kanak, tidak tahu tuak".

Sekelumit bait di atas menunjukkan betapa kuatnya intervensi kompeni dalam kehidupan istana. Menurut Karel Steenbrink (1995: 22-23) sikap terbuka

keraton Kasunanan justru dijadikan landasan kompeni untuk menyubordinasi kekuasaan raja, sehingga kompeni merasa mapan dan tidak merasa khawatir terhadap segala tindakan yang dilakukannya. Sejak saat itu superioritas kompeni dan sikap sebagai penguasa Jawa sangat dominan, khususnya dalam hubungan politik dan ekonomi dengan raja-raja Kasunanan. Orang-orang Belanda mulai menganggap dirinya sebagai guru, bahkan sebagai pengawas bagi bangsa yang masih belum terpelajar. Sikap ini diwujudkan dalam ide-ide pembangunan sekuler [politik etis dan pemberlakuan undang-undang desentralisasi 1903].

2. Babad Prayut dan Runtuhnya Jejaring Politik

Hilangnya peran ulama dalam kehidupan politik istana, dan digantikan oleh kompeni, berakibat sulit tercapai *consensus gentium* (Geertz, 1975) antara penguasa dan kelompok penekan. Yang dikategorikan sebagai kelompok penekan dalam struktur politik Jawa adalah aristokrat dan pejabat istana yang bertindak sebagai oposisi, aristrokrat dan pejabat daerah yang tertekan oleh kebijakan pusat, dan para ulama yang tersingkir dari kehidupan politik istana. Jalanan politik antara istana dan kompeni mengakibatkan kelompok penekan tidak terpesona dengan kebesaran istana, mereka lebih menghormati dan bersandar pada pemimpin-pemimpin kharismatik agama (de Graaf, 1986: 203-204). Perubahan politik di atas berakibat runtuhnya kekuasaan absolut raja, kemudian digantikan kompeni, serta hilangnya pancaran cahaya yang memberi energi ke seluruh struktur politik negara (Anderson, 1972: 1-69).

Runtuhnya kekuasaan absolut dan hilangnya pancaran cahaya, tentunya, akan sulit dicapai konsensus antar elemen-elemen politik guna menjaga tegaknya sistem politik kerajaan (Ricklefs, 2002: 27). Konsensus adalah landasan awal dalam membangun solidaritas. Melalui landasan solidaritas itu, seluruh elemen politik diikat dalam sebuah bingkai ikatan organisasi politik atau sistem politik yang berfungsi membentuk dan

memperkuat tatanan sosial baru (Bellah, 2000: 55). Dalam pemikiran politik Ibn Khaldun bahwa konsensus dan solidaritas berguna untuk memacu perubahan masyarakat dari tahapan mekanik menuju organik, dan dalam perubahan itu dibutuhkan sinergi kepemimpinan politik, antara raja dan aparatur-aparaturnya (Ahmad Syafii Maarif, 1996: 39-46).

Runtuhnya kekuasaan absolut, hilangnya pancaran cahaya kerajaan, dan kecenderungan elit politik Jawa bersandar pada pemimpin kharismatik keagamaan merupakan simbolisasi bahwa raja dan elit keraton kehilangan *interpersonal trust* dari kelompok politik dominan. Hilangnya *interpersonal trust* membawa akibat rendahnya tingkat keterlibatan dalam hidup kewargaan (*civic engagement*) antara elit politik keraton dan masyarakat. Konsekuensi adalah mereka saling menyendiri dan terpisah, sehingga ditinjau dari perspektif politik, menghancurkan keterlibatan politik masyarakat (*political engagement*). Pada dasarnya, keterlibatan politik masyarakat merupakan landasan utama bagi tegaknya struktur politik negara.

Hilangnya *interpersonal trust*, *civic engagement*, dan *political engagement* menunjukkan bahwa struktur politik kerajaan Jawa sangat primitif (Soemarsaid Moertono, 1985: 118-129). Usaha melakukan perubahan politik atau pengelolaan sistem pemerintahan, khususnya hubungan antar elit politik *Vorstenlanden* (Surakarta dan Yogyakarta) hanya sebatas pada ide saja, karena dalam kenyataannya antar elit politik Kasunanan, Kasultanan, dan Mangkunegaran tetap saling bersaing untuk mewujudkan konsep pemikiran mengenai penyatuan Mataram di bawah kendali satu penguasa (Ann Kumar, 1980: 101-110). Masing-masing penguasa tidak berusaha membangun keseimbangan politik, tetapi masing-masing memanipulasi politik untuk kepentingan diri sendiri.

Keprimitifan struktur politik Jawa diperkuat dengan marjinalisasi kelompok-kelompok sosial (pengusaha, pedagang dan perajin) yang mempunyai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Marjinalisasi kelompok sosial di atas dapat diamati dalam *Serat*

Wulang Reh, dan *Suluk Mas Nganten*. Dalam teori politik dikemukakan bahwa stabilitas politik suatu negara ditentukan oleh variabel-variabel yang saling berkaitan, yaitu variabel pembangunan ekonomi, lembaga politik, dan dukungan rakyat terhadap sistem politik negara. Pengusaha batik, pedagang, dan pengrajin adalah kelompok-kelompok ekonomi yang diinterpretasikan sebagai kelompok sosial yang memberi kontribusi terhadap pembangunan stabilitas politik dan ekonomi negara. Karena sistem politik yang dianut negara adalah feodalisme, maka aspek politik, ekonomi, dan budaya tersentralisasi dalam kekuasaan raja, sehingga peran kelompok-kelompok sosial di atas diabaikan (Arbi Sanit, 1982: 15-27).

3. Sastra Jawa, Elit Politik, dan Perubahan Sosial

Kehadiran bangsa asing yang memiliki kecerdasan, kemampuan mengelola organisasi, dan kekuatan militer menjadikan mereka sebagai 'gusti' di ranah kehidupan pribumi. Tekanan politik yang dilancarkan kompeni sepanjang Perang Jawa berakibat adanya perubahan sikap elit politik Jawa. Mereka memilih loyal kepada pemerintah Belanda dari pada kepada rajanya sendiri. Perubahan sikap aristokrat Jawa dalam perspektif psikologi dipandang sebagai 'hilangnya etika dan moral' sebagai anak bangsa.

Faktor di atas sudah ditengarai Kanjeng Ratu Mas Balitar dalam karya-karya sastranya, yang mengingatkan akan pentingnya jati diri sebagai 'satria'. Elit politik Jawa sudah memasuki tahap kehidupan *ilang sirnaning manembah*. Ungkapan ini bermakna hilangnya perasaan berdosa serta tiadanya rasa malu terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Dalam pemikiran Kanjeng Ratu Mas Balitar *ilang sirnaning manembah* diartikan sebagai hilangnya "pusaka" dan "jati diri" dalam diri satria Jawa (Alex Sudewa, 1995: 22). Pusaka adalah norma dan nilai keagamaan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dua kitab itu merupakan perisai diri dalam menghadapi ujian dan cobaan. Norma dan nilai itu diperkenalkan kembali, disebarkan, dan dikondisikan menjadi objek budaya politik. Namun pemikiran itu

dipandang berseberangan terhadap perkembangan politik saat itu, khususnya terhadap upaya meraih akses kekuasaan di Hindia Belanda. Menurut Jean Gelman Taylor (dalam Henk Schulte Nordholt, 2005: 125) bahwa karya sastra Jawa merupakan landasan membangun semangat dan kesadaran, serta berperan menyampaikan pesan moral, religius, dan orientasi politik kepada 'satria' yang berusaha meraih kekuasaan politik. Dengan demikian inti pesan Kanjeng Ratu Mas Balitar adalah agar 'satria' tidak terjebak dalam lorong-lorong dehumanisasi dan demoralisasi politik.

Karya sastra Kanjeng Ratu Mas Balitar selalu berhubungan dengan kitab-kitab Islam masa Sultan Agung. Pengenalan dan penyebaran di lingkungan priyayi sebagai idealisasi untuk meletakkan 'ideologi Islam' sebagai wahana membangun keutamaan. Karena itu makna terpenting adalah mendorong semangat dan ketegasan sikap satria Jawa dalam menghadapi intervensi kompeni (Ricklefs, 1998b: 28-126). Agaknya karya sastra Jawa belum membentuk jati diri elit politik di lingkungan keraton. Mereka terprovokasi oleh intrik-intrik yang diciptakan kompeni. Karya sastra Jawa justru diminati kelompok masyarakat menengah. Kesadaran masyarakat kelas menengah dalam membaca, memahami, dan menghayati sastra Jawa berpengaruh terhadap opini dan emosi (Mikihiro Moriyama, 2005: 4-19). Opini dan emosi itu yang dikehendaki Kanjeng Ratu Mas Balitar, agar mereka melihat realitas ekonomi, politik, dan sosial yang sedang dihadapi.

Reproduksi karya sastra merupakan gerakan kebudayaan untuk memproduksi nilai-nilai Islam guna dijadikan pijakan hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa karya sastra adalah produk doktrinal yang berakar pada propaganda. Produk itu berfungsi sebagai alat bantu dalam *recollection* (*eling lan waspada*) dan *reawakening* (Azyumardi Azra, 2002: 201-205), karena krisis politik yang terjadi telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dilihat dari segi etika politik dan moral. Sepanjang abad XVIII, elit politik Jawa terbelenggu dalam ambisi kekuasaan, dan menyeret rakyat dalam lingkaran konflik.

Sederetan konflik dapat meruntuhkan struktur sosial masyarakat, karena beban konflik politik itu berakibat langsung terhadap beban ekonomi negara dan rakyat. Apabila konflik antar elit politik terus berlangsung, akan mempercepat proses pemiskinan petani, dan kemungkinan timbulnya penyakit psikhis dalam masyarakat.

Menurut Niels Mulder (dalam Hans Antlov & Sven Cederroth ed., 2001: 81) kegagalan gerakan kebudayaan Kanjeng Ratu Mas Balitar disebabkan cara berpikir elit politik Jawa yang tidak dapat membedakan antara *res privata* dan *res publica*. Bangsa [baca: Jawa] dipandang sebagai sebuah keluarga, sehingga kepentingan bersama diasumsikan sebagai kepentingan pribadi, yang harus dimiliki dan harus dilindungi. Dengan tidak adanya perbedaan antara *res privata* dan *res publica* berakibat tidak mungkin dipraktikkannya etika politik dan moral dalam roda pemerintahan kerajaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa upaya peneliti untuk mengekstrapolasi karya sastra *Babad Prayut* ke dalam lorong psikologi dan jejaring politik abad XVIII menunjukkan bahwa:

Pertama, pengungkapan karya sastra *Babad Prayut* ditulis R.Ng. Yasadipura I yang dimaksudkan untuk membangun solidaritas antar kelompok politik dominan mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan kuatnya intervensi kompeni ke dalam jantung kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional, sehingga loyalitas para elit politik tidak ditujukan pada raja, bangsa, dan negaranya, tetapi kepada kekuasaan dan kebesaran kompeni.

Kedua, intervensi kompeni ke dalam jantung kekuasaan kerajaan tradisional berakibat hilangnya *interpersonal trust* rakyat kepada penguasa [raja]. Hilangnya *interpersonal trust* berakibat rendahnya tingkat *civic engagement* antara elit politik keraton dan masyarakat, padahal kedua faktor itu merupakan landasan terbangunnya *political engagement*. *Political engagement* itu sendiri merupakan modal utama dalam menghadapi kekuatan kompeni.

Ketiga, loyalitas elit politik keraton kepada kompeni menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan etika dan moral politik. Semboyan *ilang simaning manembah*, dan mereka tidak dapat membedakan antara *res privata* dan *res publica*, bangsa [baca: Jawa] merupakan sebuah keluarga, sehingga kepentingan keluarga ditafsirkan sebagai kepentingan pribadi yang harus dimiliki serta dilindungi.

Keempat, kajian karya sastra Babad Prayut sebagai sumber sejarah sangat penting. Kajian ini menuntut kecermatan analisis dan interpretasi, dan hasilnya dapat digunakan untuk memperkaya sejarah politik atau memperkaya sejarah mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1982. "Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia: Tinjauan Umum", *Prisma*, No. 6, Tahun XI, Juni 1982.
- Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, Taufik & Sharon Siddique (ed.). 1988. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Anderson, Benedict R.O'G. 1972, "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt (ed.), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Antlov, Hans & Sven Cederroth (eds.). 2001. "Leadership on Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule", a.b. YOI, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bellah, Robert N. 2000. "Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditionalist World", a.b. Rudy Harisyah Alam, *Beyond Belief: Menemukan Kembali Agama*. Jakarta: Paramadina.
- Burke, Peter. 1993. *History and Social Theory*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Florida, Nancy K. 2003. "Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java", a.b. Revianto B. Santosa & Nancy K. Florida, *Menyurat yang Silam Menggurat yang Menjelang: Sejarah sebagai Nubuat di Jawa Masa Kolonial*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Geertz, Clifford. 1975. *The Interpretation of Cultures*. London: Hutchinson of London.
- Graaf, H.J. de. 1986. "De Regering van Sultan Agung: Vorst van Mataram, 1613-1645, en Die van Zijn Voorganger Panembahan Seda-ing-Krapyak, 1601-1613", a.b. Pustaka Grafitipers & KITLV, *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Hockett, Homer Carey. 1967. *The Critical Methods in Historical Research and Writing*. New York: The Macmillan.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kumar, Ann. 1980. "Javanese Court Society and Politics in the Late Eighteenth Century: The Record of Lady Soldier", Part II, *Indonesia*, No. 30, 1980.

- Leur, J.C. van. 1956. *Indonesian Trade and Society: Essays in Indonesian Social and Economic History*. The Hague & Bandung: van Hoeve.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. "State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century", a.b. YOI, *Negara dan Usaha Bina Negara: Studi tentang Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta: YOI.
- Moriyama, Mikihiro. 2005. "A New Spirit: Sundanese Publishing and the Changing Configuration of Writing in Nineteenth Century West Java", a.b. Suryadi, *Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesusastraan Sunda Abad ke-19*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nordholt, Henk Schulte (ed.). 2005. "Outward Appearances: Dressing State and Society in Indonesia", a.b. M. Imam Aziz, *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*. Yogyakarta: LKIS.
- Pemberton, John. 2003. "On the Subject of Java", a.b. Hartono Hadikusumo, *"Jawa": On the Subject of Java*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Renier, G.J. 1965. *History Its Purpose and Methods*. New York: Harper & Row.
- Ricklefs, M.C. 1998a. "Islamising Java: The Long Shadow of Sultan Agung", dalam *Archipel*, Vol. I, No. 56.
- Ricklefs, M.C. 1998b. *The Seen and Unseen Worlds in Java 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II*. Honolulu: Allen & Unwin, and University of Hawai'i Press.
- Ricklefs, M.C. 2002. "Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of Division of Java", a.b. Hartono Hadikusumo & E. Setiyawati AlKhatab, *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Sanit, Arbi. 1982. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simuh. 1988. *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Steenbrink, Karel A. 1995. "Dutch Colonialism and Islam in Indonesia: Conflict and Contact 1596-1950" a.b. Suryan A. Jamrah, *Kawan dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1950*. Bandung: Mizan.
- Sudewa, Alex. 1995. *Dari Kartasura ke Surakarta: Studi Kasus Serat Iskandar*. Yogyakarta: Lembaga Studi Asia.
- Varma, S.P. 2007. "Modern Political Theory", a.b. Yohanes Kristiarto SL, *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijdan, Aden SZ., et. al. 2007. *Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Safiria Insania Press